

IMPLEMENTASI PROGRAM GAPURA DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Norliana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program GAPURA dalam pembangunan prasarana Desa di Desa Sarang Tiung. Serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan Program GAPURA dalam pembangunan prasarana Desa di Desa Sarang Tiung.

Hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Gapura dalam pembangunan prasarana desa belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya aktivitas/ kegiatan program belum dilaksanakan secara maksimal yaitu sosialisasi, Musdes I dan II. Selain itu, terbatasnya peralatan dan bahan yang disebabkan oleh anggaran yang terbatas dan tidak adanya tinjauan langsung Tim ke lapangan serta adanya prosedur yang belum dijalankan dari tahap pelaksanaan yaitu gotong royong dan pada tahap pengawasan yaitu kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD sehingga laporan yang dibuat sebagai bahan evaluasi ke Kecamatan kurang valid. Kendala dalam proses Pelaksanaan Program GAPURA yaitu dalam proses perencanaan kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, Musdes I dan Musdes II, khususnya sumber daya manusia yang terampil dan kreatif dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan prasarana desa. Pada pelaksanaan yaitu adanya keterbatasan dana dalam memenuhi seluruh peralatan dan bahan yang diperlukan di lapangan, sehingga peralatan dan bahan yang tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kendala lain yang dirasakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan prasarana desa. Karena salah satu komponen yang dapat mensukseskan pembangunan desa adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri.

Kata kunci : implementasi, program gapura

1. Latar Belakang Masalah

Posisi Desa yang memiliki otonomi yang sangat strategis memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam hal pembangunan desa. Oleh karena itu, peran pemerintah pada masa otonomi daerah ini diharapkan bisa memberikan dukungan luas bagi terbukanya peluang untuk pembangunan desa.

Terkait dengan hal tersebut, maka pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengeluarkan suatu konsep kebijakan program pembangunan pedesaan melalui pola pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana langsung pembangunan. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah

Program Gerakan Pembangunan Rakyat (GAPURA). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai implementasi sebagian misi pembangunan guna mencapai visi Kabupaten Kotabaru Periode 2011-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kotabaru Yang Madani Yaitu Masyarakat Yang Mandiri Penuh Kreativitas, Kesejahteraan, Tertib, Aman Dan Damai. Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyalurkan bantuan dana penunjang pembangunan kepada desa yang merupakan kesatuan hukum terkecil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Secara khusus, Program GAPURA ini dirancang untuk membangun prasarana dan sarana dasar perdesaan, pengembangan kelembagaan masyarakat desa menuju terwujudnya otonomi desa serta dalam

rangka pengentasan kemiskinan. Pengelolaan Gapura ini diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat desa itu sendiri dimana masyarakat penerima bantuan diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah yaitu Musyawarah Desa (Musdes).

Desa Sarang Tiung merupakan salah satu desa yang pada tahun anggaran 2011 menyelenggarakan Program GAPURA ini. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/ 29/ KUM Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Gerakan Pembangunan Rakyat (GAPURA) Sa'ajaan Bagi Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2011, yang menetapkan 20 Kecamatan penerima bantuan dana Program GAPURA dengan jumlah desa sebanyak 197 desa dan 4 kelurahan.

Program GAPURA merupakan program untuk mempercepat pemerataan pembangunan Desa, dengan tetap mendasarkan pada konsep pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat yang berkelanjutan dan terarah. Program GAPURA merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Bupati Kotabaru dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna pemerataan pembangunan desa. Karena menggunakan konsep pembangunan dari bawah keatas yaitu melalui pola pemberdayaan masyarakat, semestinya hasil dari program ini mampu menjawab dan memenuhi harapan masyarakat desa, selain itu hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sasaran yang ditentukan. Namun, fakta menunjukkan ternyata belum optimalnya implementasi Program GAPURA dalam pelaksanaan pembangunan Desa, hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan prasarana desa yaitu pipanisasi yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Sebagai contoh di wilayah RT. I yang awal perencanaannya jumlah KK yang menerima manfaat Program GAPURA sebanyak 35 orang, namun setelah pelaksanaannya hanya 20 KK saja yang dapat. Selain itu, masih kurangnya

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat pada persentase tingkat kehadiran warga pada Musdes I dan II. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu dan terampil dalam merencanakan pembangunan desa. Usul kegiatan yang disampaikan pada Musdes II tidak sama dengan apa yang diperlukan dilingkungan RT nya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi Program GAPURA dalam pembangunan prasarana Desa di Desa Sarang Tiung ? Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program GAPURA dalam pembangunan prasarana Desa di Desa Sarang Tiung ?

3. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas tentang apa itu implementasi kebijakan terlebih dahulu perlu ditinjau mengenai kebijakan publik itu sendiri.

Kebijakan publik merupakan konsep yang sangat kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif serta merupakan suatu kajian yang bersifat lintas bidang dengan ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Memang tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin.

Implementasi kebijakan adalah proses untuk mentransformasikan keputusan ke dalam tindakan. Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan dan tercapainya sasaran. Tidak semua kebijakan berakhir dengan keberhasilan, karena itu setiap kebijakan memerlukan evaluasi. Proses evaluasi dapat dilakukan secara vertikal oleh pimpinan eksekutif, secara internal oleh lembaga implementasi, secara horisontal oleh lembaga-lembaga pengawas publik, atau secara eksternal oleh pers, akademisi, tokoh masyarakat, serta masyarakat luas.

Proses implementasi berperan besar dalam mencapai hasil seperti yang diharapkan dengan apa yang kenyataannya

terjadi atau dicapai (*Implementation Gap*). Hal ini dipengaruhi oleh apa yang disebut oleh Ilham sebagaimana yang dikutip oleh Wahab (1997) sebagai *Implementation Capacity* diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal dapat tercapai. Kenyataannya, kebijakan pemerintah sebenarnya memiliki resiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan ini oleh Hogwood dan Gun (Wahab, 1997) dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Non Implementation*, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Keadaan ini dipengaruhi oleh bentuk factor, seperti kerjasama, penguasaan permasalahan ataupun wilayah permasalahan yang diluar jangkauan kewenangan.
2. *Unsucesful Implementation*, kebanyakan disebabkan oleh faktor eksternal yang ternyata tidak menguntungkan.

Selain itu, ada *Positive Gap* dan *Negatif Gap*. Di saat kemampuan organisasi atau pemerintah lebih besar dan mampu memenuhi keperluan yang diinginkan masyarakat terkait kesejahteraan mereka (*Positive Gap*). Namun ketika keinginan masyarakat lebih besar daripada kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah, dimana pada saat tersebut pemerintah tidak mampu mencapai sesuai yang diharapkan masyarakat maka timbullah (*negative gap*), yang biasanya menyebabkan suatu kebijakan tidak berhasil dijalankan karena sasaran yang ingin dituju tidak tercapai. Ada beberapa komponen yang dapat dijadikan komponen perbandingan antara *Positive Gap* dan *Negatif Gap*, yaitu struktur (*structure*), kebudayaan (*culture*) dan sumber daya (*resource*).

Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka paling tidak diperlukan tiga hal yang menurut Abdul Wahab (1997)

sebagai berikut : (1) pemrakarsa kebijakan / pembuat kebijakan (*the center*), (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*), (3) akto-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*).

Pada intinya ada tiga prinsip kebijakan (*three balance principle*) yang menjadi fokus dalam mempelajari suatu kebijakan yaitu *formulation*, *implementation* dan *evaluation*. Dalam penelitian ini penulis melihat kebijakan dari aspek implementasinya yaitu proses implementasi Program GAPURA dalam pelaksanaan Pembangunan Prasarana Desa Sarang Tiung di Kabupaten Kotabaru.

Menurut George C. Edward III (dalam Hessel Nogi, 2003:11) menyatakan bahwa ada 4 (empat) pendekatan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan yakni:

1. Komunikasi

Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni Transmisi, Konsistensi dan Kejelasan. Komunikasi sangat diperlukan agar implementasi menjadi efektif. Mereka yang tanggungjawabnya mengimplementasikan sebuah keputusan harus tahu apa yang nantinya dan seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat, agar kebijakan menjadi jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber daya

Sumber daya meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara mengimplementasikan kebijakan, penyesuaian lainnya bagi yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan sebagaimana dimaksud dan berbagai fasilitas didalam memberikan pelayanan.

3. Disposisi atau sikap implementator adalah factor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan public. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka pasti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan. Dan watak karakteristik yang harus dimiliki oleh implementor yaitu kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan, salah satu yang penting adalah adanya stantar operasional prosedur (SOP).

Sebuah kebijakan yang digulirkan hendaknya dalam implementasinya diharapkan berhasil dan tepat sasaran, oleh karenanya Wheelen dan Hunger (2008) dalam Amir (2011) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur dalam strategi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Program, dimana berbagai macam aktivitas atau kegiatan yang harus dijalankan.
2. Anggaran, biaya dari program yang telah dirumuskan.
3. Prosedur, urutan – urutan dalam satu aktivitas/ pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan dikaji dan diteliti apakah proses implementasi Program GAPURA telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perda dan kendala apa saja yang dihadapi selama pengimplementasiannya. Maka fokus penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Program GAPURA dalam Pembangunan Prasarana Desa:
 - a. Perencanaan, terdiri dari Sosialisasi, Media

Informasi dalam penyelenggaraan Program GAPURA, Musyawarah Desa Tahap I dan II serta tahapan penulisan Usulan Program Desa ;

- b. Pelaksanaan, terdiri dari Pencairan Dana, pengarahan Tenaga Kerja, Pengadaan Bahan material, Musyawarah Desa Tahap III;
- c. Pengawasan dan Evaluasi program Gapura.

2. Kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program GAPURA.

Konsep kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dilakukan dengan melaksanakan program GAPURA Melalui Pola Pemberdayaan Masyarakat Sa-Ijaan. Program ini di konsep sedemikian rupa dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan kelembagaan Pemerintahan Desa. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sebagian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kotabaru Periode 2011-2015. Secara khusus, GAPURA dirancang untuk membangun prasarana dan sarana dasar perdesaan, pengembangan kelembagaan masyarakat desa menuju terwujudnya otonomi desa serta dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pengelolaan Gapura ini diberikan secara langsung kepada masyarakat, dimana masyarakat penerima bantuan diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah. Pengelolaan program GAPURA ini diberikan langsung kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Adapun tujuan program GAPURA yaitu :

1. Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa menuju terwujudnya otonomi desa serta mempercepat

pemerataan pembangunan yang ditempuh melalui pembangunan prasarana dan sarana dasar yang mendukung pembangunan di pedesaan.

2. Tujuan khusus
 - a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat (LPM) dan aparat desa untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
 - b. Meningkatkan kemampuan otonomi pemerintah desa.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan masyarakat pedesaan.
 - d. Menyediakan prasarana dan sarana dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.

Sasaran Program Gapura adalah kegiatan fisik dalam rangka pemenuhan prasarana dan sarana dasar perdesaan yang mampu dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat, untuk tahun pertama ini dibatasi hanya 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu :

- 1) Prasarana Perhubungan seperti : Jalan desa, Jembatan kontruksi betton, Semenisasi Gang, dan Gorong-gorong. (khusus untuk bahan yang menggunakan kayu ulin agar lebih dipertimbangkan terutama menyangkut tata cara pengadaannya)
- 2) Prasarana Air Bersih (pipanisasi, Sumur bor/Sumur Gali, Dam/Bendungan penampung dan lain - lain).
- 3) Prasarana Listrik Desa (bagi desa-desa yang belum terjangkau PLN).

Dalam menunjang pelaksanaan Program GAPURA, maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengalokasikan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotabaru untuk tahun pertama Tahun

Anggaran 2011 sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini penulis ingin menguraikan secara mendalam mengenai focus penelitian melalui uraian dalam bentuk narasi, sehingga dapat dijelaskan secara mendalam.

Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah, Moleong (2006).

Arikunto (2010) menyatakan ada 3 (tiga) persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian yaitu pertama sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kedua berencana artinya direncanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah sebelumnya. Ketiga mengikuti konsep ilmiah artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan suatu metode penelitian dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang terhadap fakta-fakta yang tampak secara khusus sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum. Dalam menentukan Lokus (*situs*) penelitian, terdapat berbagai factor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti. Dalam hubungan ini Moleong (2006) berpendapat bahwa cara terbaik yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantive, pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Adanya keterbatasan geografis, waktu, biaya dan tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokus penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengambil lokus di di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten kotabaru. Penentuan lokus penelitian ini atas pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Desa Sarang Tiung termasuk desa dengan sumber daya alam yang melimpah yaitu perkebunan, kelautan dan perairan, namun memiliki prasarana yang sangat terbatas untuk mengelolanya.
2. Desa Sarang Tiung berada dalam wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara yang merupakan penerima Dana GAPURA terbesar yaitu 10,5 % dari jumlah dana Gapura tahun 2011.
3. Desa Sarang Tiung merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Pulau laut Utara yang dalam wilayahnya terdapat perusahaan yang sangat besar yaitu PT. Arutmin Indonesia yang dibangun sejak tahun 1990, namun hingga saat ini belum mampu menjadi desa dengan prasarana yang cukup memadai.
4. Desa Sarang Tiung adalah daerah tujuan wisata, pengunjung dapat berasal dari masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru maupun dari luar daerah.

Informan Penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan dalam mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Menurut Huberman dan Miles (1992), informan adalah orang – orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Penentuan informan yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik *purposive sample* (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2006) *Purposive sampling* adalah ”

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu ”. Arikunto (2010) menyatakan bahwa sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang UEM (Usaha Ekonomi Masyarakat) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Seksi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kepala Desa Sarang Tiung, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Agama, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Program GAPURA beserta pengurusnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Dokumentasi, Kegiatan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta referensi lain yang relevan dengan bidang yang diteliti. Dalam penelitian ini studi dokumentasi menjadi sumber data utama. Wawancara, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si pejawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Sarang Tiung merupakan salah satu dari 21 Desa yang berada di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Desa Sarang Tiung mempunyai batas - batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gedambaan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tirawan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut.

Jarak tempuh ke Desa Sarang Tiung 9 Km dari ibukota Kecamatan Pulau Laut

Utara dan ibukota Kabupaten Kotabaru. Ketersediaan sarana angkutan umum adalah angkutan pedesaan yang ada setiap saat, dengan waktu tempuh ke fasilitas terdekat (kesehatan, perekonomian, pemerintahan) Kabupaten sekitar 35 – 40 menit.

Luas wilayah Desa Sarang Tiung mencapai 13.500 Ha. Desa ini membawahi 3 (tiga) RW dan 10 (sepuluh) RT. Dan pemanfaatan lahan yang ada digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan pertanian dan lain-lain.

Alokasi dana Program GAPURA yang diterima oleh Desa Sarang Tiung adalah sebesar Rp.55.000.000,-, dari dana Program GAPURA sebesar Rp.1.155.000.000,- untuk wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara yang terdiri dari 21 Desa. Dana sebesar Rp. 55.000.000,00 tersebut dicairkan melalui satu tahapan, dimana dari dana tersebut digunakan untuk biaya operasional pelaksanaan Program GAPURA yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00. Sehingga dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana fisik desa sebesar Rp. 50.000.000,00 .

Implementasi program GAPURA dalam Pembangunan Prasarana Desa Sarang Tiung

1) Perencanaan

Ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan program gapura yaitu pertama Sosialisasi informasi GAPURA. Dilakukan dalam rangka mendukung ketertiban dan keterbukaan dalam Program GAPURA kepada masyarakat dan aparat pemerintah. Sosialisasi di tingkat desa bertujuan menjelaskan kebijakan dan prinsip Program GAPURA serta mekanisme pelaksanaannya. Sosialisasi difasilitasi oleh Tim Teknis Kecamatan dan Kepala Desa serta dihadiri oleh LPM, BPD, Aparat Desa, Tokoh – Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, PKK, Organisasi Lokal masyarakat desa dan masyarakat luas di desa. Pada dasarnya sosialisasi ini dapat dihadiri oleh siapa saja yang berminat dilingkungan wilayah desa setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarang Tiung pada hari minggu

tanggal 14 Oktober 2012, menyatakan bahwa :

“ Pada saat sosialisasi program GAPURA, kehadiran masyarakat desa masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya penyebarluasan informasi tentang akan diselenggarakannya program GAPURA yang dilaksanakan di Balai Desa. Pada saat sosialisasi hanya terdapat 15 orang termasuk saya dan perangkat desa, BPD dan LPM. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta karena dianggap kegiatan yang akan dilaksanakan tidak sepenuhnya mampu membantu perekonomian mereka, sehingga mereka lebih mementingkan untuk bekerja menambah rezeki di dalam rumah”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Pulau Laut Utara sebagai Ketua Tim Teknis Kecamatan pada hari senin tanggal 15 Oktober 2012, beliau menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan sosialisasi Program GAPURA diselenggarakan di tiap – tiap desa dan kelurahan yang menjadi penerima Program GAPURA dengan tujuan agar masyarakat serta tim pelaksana di tingkat desa dapat memahami secara mendalam proses penyelenggaraan Program GAPURA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pemeliharaan prasarana yang nantinya telah selesai di bangun. Sebagian besar desa yang kami kunjungi pada saat sosialisasi memang tingkat kehadirannya dapat dikatakan masih sangat kurang dari apa yang kami harapkan, dengan kondisi yang seperti itu, maka sangat mempengaruhi proses kegiatan selanjutnya. Oleh karenanya setelah sosialisasi biasanya kami selalu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa agar lebih pro aktif dalam merangkul masyarakatnya agar mau ikut langsung berpartisipasi.” Adapun kendala yang dihadapi pada proses sosialisasi adalah kurang aktifnya masyarakat menghadiri kegiatan ini, dikarenakan kurangnya penyampaian informasi oleh pihak pemerintah desa kepada masyarakat. Seharusnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sosialisasi, sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada masing – masing RT sehingga nantinya dapat disampaikan langsung ke

masyarakat desa. Inilah salah satu kendala awal yang kami sering hadapi jika melakukan sosialisasi sehingga akan mempengaruhi proses selanjutnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarang Tiung menyatakan bahwa : "Media informasi yang ada di Desa ini memang terbatas walaupun sekarang ini sudah zamannya HP, namun hampir seluruh ketua RT kami disini belum bisa mengoperasikan HP. Sehingga untuk penyebarluasan informasi masih dikatakan sulit, dan media informasi sekarang ini yang kami anggap efektif hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu pada hari jum'at setelah shalat jum'at dilaksanakan atau ketika kami bertemu di jalan. Namun, hal itu juga kurang membuat masyarakat terdorong untuk mengikuti sosialisasi karena kebanyakan yang beralasan lupa atau sedang banyak pekerjaan di rumah.

Tahapan kedua yaitu Musyawarah desa Tahap I. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program GAPURA dihimbau untuk menyebarluaskan informasi tentang adanya Program GAPURA yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat yang tidak hadir pada saat sosialisasi dapat berpartisipasi dan aktif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan setelah sosialisasi yaitu mengadakan Musyawarah Desa yang dilakukan secara bertahap.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Desa tahap I yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 sangatlah kurang, hal ini dapat dilihat pada daftar hadir yang diedarkan dan hanya ada 21 orang yang berhadir. Berdasarkan Berita Acara Musdes I maka dipilih Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa dan Tenaga Tekhnis Desa (TTD), yaitu :

- I. TPK : Ketua :
TAHAR
Sekretaris :
RAHMANUDDIN
Bendahara : M.
JOHAN ARIFIN
- II. TTD : SURIANSYAH NR

Penulis pun menanyakan beberapa hal tentang program Gapura kepada tokoh

agama, tokoh masyarakat dan pemuda di Desa Sarang Tiung, secara garis besar jawaban mereka adalah sama bahwa :

"Kami tidak begitu tahu tentang program itu". Lebih lanjut penulis menanyakan tentang pemberitahuan akan dilaksanakannya program gapura, mereka menjawab bahwa "memang ada diberitahukan, namun karena kami tidak begitu dijelaskan bagaimana dan untuk apa program itu maka kami lebih mementingkan bekerja untuk rezeki di rumah. Kami kan perlu dijelaskan dulu secara rinci, maklum kami hanya orang desa yang mungkin kalo hanya sedikit penjelasan tidak mengerti, makanya kalau sekedar lewat saja, kami pun menanggapinya ya lewat saja juga. Dan seperti tahun sebelumnya banyak kegiatan untuk masyarakat tapi buktinya tidak samapai kami menikmati oleh karenanya kami tidak terlalu memfokuskan diri ke kegiatan desa. Dan itu tidak menjamin penghidupan rumah tangga kami juga".

Tahapan ketiga adalah Musyawarah Desa tahap II merupakan pertemuan di tingkat desa yang bertujuan untuk menetapkan usulan kegiatan pembangunan desa dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk diajukan ke Tim Koordinasi Kabupaten. Dengan adanya Musdes tahap II ini diharapkan adanya kesepakatan aspirasi dari seluruh RT mengenai usulan kegiatan pembangunan desa yang nantinya ditetapkan sebagai usulan definitif desa yang dituangkan dalam berita acara. Seperti halnya pada Musdes I, partisipasi dan peran aktif dari masyarakat pada Musdes II ini pun begitu diperlukan guna menentukan kegiatan apa yang nantinya akan dilaksanakan dan dijadikan prioritas dalam Program GAPURA.

Musyawarah Desa Tahap II merupakan tahap kelima dari perencanaan program GAPURA. Partisipasi masyarakat dalam Musdes tahap ke II mengalami peningkatan jika dibandingkan pada Musdes tahap I yaitu bertambah 10 orang menjadi 31 orang. Musdes II ini merupakan tahapan dimana usulan – usulan dari RT ditampung dan di saring sehingga nantinya akan menghasilkan gagasan yang dijadikan kegiatan prioritas dalam program gapura.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program GAPURA merupakan tahapan penyelenggaraan seluruh rencana yang telah disepakati dalam Musdes II, tahap ini dimulai dari pencairan dana, pelaksanaan kegiatan sampai pada ditandatanganinya Berita Acara dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Proyek (SP4) pada saat Musdes III dilaksanakan.

Pencairan dana merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan Program GAPURA. Lancarnya pelaksanaan Program GAPURA tergantung pada proses pencairan dana. Karena kegiatan tidak akan berjalan tanpa adanya dana.

Hasil wawancara dengan kepala Desa, ketua TPK dan Bendahara desa menyatakan bahwa : “ Proses pencairan dana tepat pada waktunya. Oleh karenanya setelah bendahara desa serah terima dengan bendahara program Gapura segera dipergunakan untuk memenuhi seluruh keperluan dalam pelaksanaan kegiatan pipanisasi. Dana yang dicairkan sebesar Rp. 55.000.000,- melalui satu tahapan. Dimana khusus untuk pelaksanaan kegiatan pipanisasi sebesar Rp. 50.000.000,- dan untuk dana pendukung/ untuk honor tim dan sebagainya sebesar Rp. 5.000.000,- .”

Setelah proses pencairan dana maka Pemilihan dan pengarahan tenaga kerja dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pipanisasi di masing – masing wilayah RT. Pada prinsipnya program Gapura dikerjakan secara gotong royong jadi tidak ada upah kerja karena kegiatan ini dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat maka harus dibuktikan dengan swadaya masyarakat.

Pemilihan dan pengarahan tenaga kerja bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan melalui Program GAPURA dapat berjalan secara terarah sehingga mendapatkan hasil pembangunan yang memuaskan. Dan yang paling utama adalah manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Ketua TPK, menyatakan bahwa : “Kendala yang sangat berarti kami rasakan pada saat akan melaksanakan kegiatan pipanisasi, karena sebagian besar

masyarakat di masing – masing RT tidak mau melakukan gotong royong. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mementingkan pekerjaan pribadi. Gotong royong pipanisasi hanya akan membuang waktu mereka mencari nafkah untuk rezeki di rumah, apalagi hal tersebut tidak menghasilkan upah yang dapat mereka pergunakan memenuhi kebutuhan dirumah. Jadi, sebagian besar yang melakukan kegiatan dilapangan adalah kami dan ketua RT serta hanya sebagian kecil masyarakat “.

Penulis pun menanyakannya langsung kepada tokoh masyarakat, pemuda dan agama, jawaban mereka adalah :

“Memang sebagian besar masyarakat tidak mau turun untuk gotong royong karena Kepala Desa dan Tim Pelaksana kegiatan langsung saja datang bersama dengan ketua RT dan mengatakan bahwa akan dilaksanakan gotong royong pelaksanaan pipanisasi. Selain itu, kami juga kan ada pekerjaan lain yaitu mencari nafkah. Seharusnya pemberituannya satu minggu atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan jadi kami ada persiapan.”

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, agama dan pemuda bahwa :

”Pada saat menyediakan bahan – bahan untuk pipanisasi ternyata keadaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang disediakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, jadi hasilnya adalah tidak semua KK yang ada di dalam satu wilayah RT menerima dan merasakan manfaat pipanisasi.”

Di wilayah RT lain ada salah satu warga suku bugis yang kami tanyai karena juga mendapatkan pipa, bahwa :

”dapa’ka iya apa’na lebih macawe’ bolae lo bendungeng’e,tapi’ na ambo’ na ani’ ende’na dapa pas la’de ero pipae ro ende’na lettu pipa loppoero, jadi pake sellang mani pole bola iyehe, de’topang kasi’ ro protes pinana apa’na megato kapang ro jamajamanna, assaleng jalanni waewe, massellang ga pipa ga yang penting jalanniro”.

Penulis pun langsung menanyakan kepada KK yang menerima manfaat Gapura

di RT lain lagi, dengan jawaban yang sama bahwa:

”Sebenarnya kami ada perasaan yang kurang enak kepada tetangga lainnya, karena masih ada dalam satu RT dengan kami belum di pipa airnya. Memang ini bukan kesalahan kami, namun bagaimana yah. Kadang kami dikira sebagai keluarga dekat kades atau pa Tahar. Bahkan kami langsung menanyakan kepada pa Tahar, kata beliau nanti tahun depan yang lain dapat, itu saja jawabannya.” Memang berdasarkan pengamatan penulis bahwa yang mendapatkan manfaat adalah kebanyakan rumahnya dekat dengan bendungan atau sumber air yang di pipanisasi.

Penulis juga melakukan wawancara dengan KK yang tidak mendapatkan manfaat pipanisasi bahwa : ”Ya memang nasib kami tidak dapat pipa air, karena kata pa Tahar rumah kami jauh dari bendungan. Menurut kami kenapa harus mengadakan pipa kalau tidak semuanya bisa dapat, kan ada cemburu dari masing – masing KK disini. Kata pa Tahar tahun depan diusahakan dapat juga, eh ternyata tidak, malah kegiatan sekarang yang kami dengar adalah membangun jembatan. Ternyata janji Cuma janji aja, ya kami juga tidak selamanya harus bersedih, kami tetap melanjutkan dengan memakai selang. Ya mungkin rezeki KK yang lain yang telah dapat pipa. Kalau kami sih yang penting airnya jalan lah.”

Selain itu, ada pula warga yang mengatakan bahwa : ”gapura haji kami kada tahu apa itu, katua rt lewat lewat haji kada jua mamadahkan amun ada pipa handak dipasang. Karna kami kada tapi pintar kalu lah. Pas malihat ampun pa maje’ hanyar ne kami batakun lawan pa maje kenapa ada pipa dimuka rumah pian basungsungan hari, nukarkah? kada jar, handak masang pipa kalo kena jam 10 ne. Han kanapa pang aku kada? tahu lah nak jawaban pa maje’ ap, jar pambakal nang baluman dapat ne bisa tahun kaina ja, karna duitnya kada cukup, sudah diolahkan kh jar lagi proposalnya. uma jar ku tadi purunnya pang pambakal, kada purun pang jar, bagiliran bardasarkan deretan rumah, oh jar kita ayu ae ditunggu, mun pacangan kada dapat kena ne kawa ae diprotes, heee ”.

Setelah ditanyakan kepada TPK, jawaban mereka adalah : ”Memang benar hal tersebut, karena kami kurang memperhitungkan kondisi yang ada dilapangan, dan masih kurang cermatnya kami dalam merencanakan penyediaan bahan sehingga mengakibatkan tidak semua KK yang ada dalam satu wilayah RT merasakan pipanisasi. Hal ini menjadsi pelajaran yang sangat berharga bagi kami selaku TPK.”

Penulis pun langsung menanyakan hal tersebut kepada BPD selaku pengawas langsung pelaksanaan kegiatan pipanisasi, ketua BPD menyatakan bahwa :

”Kesalahan ini memang berada dipihak TPK yang kurang perhatian dalam pengadaan bahan-bahan. Kami sebagai pengawas hanya dapat menegur dan memberikan himbauan bahwa ini merupakan pelajarsan yang sangat berharga untuk kegiatan ditahun depan.”

Kasi PMD di Kecamatan pun sempat kami tanyai permasalahan ini dan menyatakan bahwa : ” Hal ini tidak kami ketahui karena dilaporan yang telah mereka buat bahwa sesuai dengan proposal awal. Jadi, kami mengacu pada laporan yang mereka buat saja.”

Tahap selanjutnya yaitu Musyawarah Serah Terima (Musdes III / Muskel III) adalah merupakan pertemuan forum tertinggi tingkat desa / kelurahan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan, kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana Gapura dinyatakan selesai 100%.

Berdasarkan daftar hadir yang ada di laporan kegiatan program gapura, dapat diketahui bahwa hanya 20 orang yang berhadir pada saat Musdes III dilaksanakna. Penulis pun menanyakannya kepada Tim pelaksana kegiatan, bahwa :

Hal ini merupakan imbas dari banyaknya masyarakat yang belum menerima manfaat kegiatan pipanisasi program gapura. Dan sedikit banyaknya klesahan itu berasal dari kami sebagai TPK. Dan ketika musdes III dilaksanakan seharusnya ada dibentuk Unit Pengelola Sarana (UPS), namun karena kurangnya masyarakat yang hadir maka acara tersebut tidak dilaksanagn.”

3) Pengawasan

Pengawasan Program GAPURA dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kabupaten di tingkat Kabupaten. Sedangkan ditingkat Desa, pengawasan dilakukan oleh BPD dan LPM. Pengawasan merupakan faktor penting dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu yang sedang dan telah dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan serta dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam pekerjaan yang kemudian diperbaiki. Selain itu, pengawasan berfungsi untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD yang menjabat sebagai pengawas Program Gapura menyatakan bahwa : Pengawasan dilaksanakan langsung ke lapangan. Namun tidak tiap RT yang didatangi hanya sebagian saja. Hal ini dikarenakan banyaknya terbentur jadwal dengan pekerjaan yang lain. Laporan pengawasan disampaikan ke tingkat kecamatan sebagai bahan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Rata – rata saya melakukan pengawasan ketika diawal pekerjaan atau setelah selesai pekerjaan.”

Hasil wawancara penulis dengan tokoh agama, masyarakat dan pemuda tentang pengawasan yang dilakukan oleh ketua BPD adalah :

”Kami mohon maaf jika harus mengatakan bahwa pekerjaan beliau tidak dilakukan dengan baik, karena tidak melakukan pengawasan secara keseluruhan. Bahkan tidak semua RT yang beliau datangi. Hanya pas ada waktu saja. Oleh karenanya jika dilapangan ada kesalahan itu karena kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pengawas. Kami sebagai masyarakat yang tidak punya kekuatan mana bisa protes. Hanya bisa mengeluh kepada sesama masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan ketua TPK tentang pengawasan yang dilakukan oleh ketua BPD adalah :

” Pengawasan digawi pa Bade’. Sidin mengawasi memang pas tuntung gawean ja, kami suruh ae jua kami bawai jua sidin pas handak begawe pertama tu, tapi jar sidin pas ada gawean jua, kena jagin jar pas ada waktu kada begawi meliati ae kesitu jar. Kami ni

ngaran kekawanan jua kada kawa mengarasi, ya lo.”

Rencana KK yang akan menerima manfaat kegiatan pipanisasi sebanyak 652 KK. Namun setelah program Gapura di implementasikan ternyata hanya 187 KK yang dapat dan masih banyak sekali kk yang belum menerima manfaat dari kegiatan pipanisasi ini yaitu sebanyak 465 KK.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menganalisis implementasi program GAPURA, dalam hal ini berkaitan dengan yang dinyatakan oleh Wheelen dan Hunger (2008) dalam amir (2011) bahwa unsur yang pertama dalam Strategi Implementasi Kebijakan adalah Program, aktivitas yang harus dijalankan. Program Gapura mempunyai berbagai macam aktivitas yang harus dijalankan, diantaranya yaitu dalam perencanaan ada sosialisasi, Musdes tahap I dan II, namun pada kenyataannya aktivitas ini tidak berjalan dengan baik karena rendahnya tingkat kehadiran masyarakat. Akibatnya kegiatan Program Gapura untuk tahap perencanaan tidak dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung antara pemerintah desa, tim pelaksana dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada daftar hadir yang ada pada acara Musdes I hanya dihadiri sebanyak 31 orang dan Musdes II semakin menurun hanya 21 orang saja.

Selain itu, pada saat pelaksanaan kegiatan yang merupakan inti dalam program Gapura yaitu pemasangan pipa dari sumber air sampai ke rumah warga. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bergotong royong mewarnai aktivitas ini, selain itu pemerintah desa dan tim pelaksana pun kurang mendorong dan merangkul masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Musdes III merupakan aktivitas yang dijalankan dalam tahap pelaksanaan dimana Musdes ini merupakan kegiatan serah terima hasil program Gapura. Dalam Musdes III ini, tingkat kehadiran masyarakat masih sangat rendah hanya sebanyak 21 orang saja yang menghadirinya. Tahapan ketiga dalam program gapura ini yaitu pengendalian dimana ada aktivitas pengawasan dan evaluasi. Dimana pengawasan dilapangan dilakukan langsung oleh ketua BPD, selain itu juga beliau langsung melaporkannya

secara tertulis ke Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, aktivitas pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal karena pengawasan hanya dilakukan beliau pada saat kegiatan telah selesai dikerjakan.

Unsur kedua dalam strategi implementasi yaitu Anggaran atau biaya dari program. Dana yang disediakan untuk menjalankan program gapura sebesar Rp. 55.000.000,- per desa/ kelurahan. Dana sebesar Rp. 55.000.000,- diperuntukkan pembangunan fisik sebesar Rp. 50.000.000,- dan biaya operasional Rp. 5.000.000,-. Hasil penelitian penulis bahwa terdapat permasalahan Kurangnya atau terbatasnya peralatan dan bahan dalam proses pelaksanaan Gapura. Hal ini selain terletak pada tidak adanya analisis kebutuhan akan peralatan atau bahan yang dilakukan oleh Tim, juga adanya Keterbatasan Dana . Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- tidak sepenuhnya digunakan untuk pembelian bahan, namun juga ada untuk pembayaran pajak dari tiap pembelian bahan. Selain itu, di dalam proposal kegiatan Program Gapura ada dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp. 4.145.000,-.

Unsur ketiga yaitu prosedur. Dalam implementasi Program gapura ada prosedur atau urutan – urutan dalam tiap aktivitas atau pekerjaannya. Tidak semua prosedur dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah desa, Tim dan juga masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada tahap pelaksanaan kegiatan pisanisasi dan pengawasannya. Pada tahap pelaksanaan diharapkan adanya gotong royong, namun hal tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan kepasifan pemerintah desa dan Tim dalam mendorong masyarakat untuk saling bekerjasama. Selain itu, dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh Ketua BPD yang seharusnya dilaksanakan sebelum dimulainya pekerjaan, saat dilaksanakannya dan setelah akhir pelaksanaan pekerjaan. Namun, pengawasan hanya dilakukan di akhir pekerjaan saja.

Kurang tercapainya tujuan dan sasaran dalam proses implementasi kebijakan dikarenakan adanya kendala – kendala. Seperti halnya Implementasi Program Gapura di Desa Sarang Tiung terkendala oleh rendahnya tingkat kehadiran masyarakat

dalam setiap kegiatan program Gapura, seperti pada sosialisasi Program Gapura. Sosialisasi di tingkat Desa bertujuan menjelaskan kebijakan- kebijakan dan prinsip Program Gapura serta mekanisme pelaksanaannya kepada masyarakat. Sosialisasi di tingkat Desa difasilitasi oleh Tim Teknis Kecamatan dan Kepala Desa serta dihadiri oleh LPM, BPD, Aparat Desa, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, PKK, Organisasi lokal masyarakat desa dan masyarakat luas di desa, pada dasarnya sosialisasi ini dapat dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat di lingkungan wilayah desa setempat. Namun, pada kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat yang berhadir. Selain itu, pada kegiatan Musyawarah Desa Tahap I dan II. Dimana kegiatan ini merupakan forum pertemuan masyarakat desa yang dilaksanakan untuk membahas, menentukan dan menyepakati pemilihan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tenaga Teknis Desa (TTD) untuk di tingkat Desa dan merupakan pertemuan yang bertujuan menetapkan usulan desa. Selain itu, pada Musdes II ini menetapkan usulan desa dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk diajukan ke Tim Koordinasi Kabupaten.

Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Program Tingkat Desa dalam kurang mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif juga menjadi kendala. Salah satu yang terjadi di lapangan adalah kurangnya media informasi yang disediakan di masing – masing wilayah RT. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan gotong royong menjadi kendala berikutnya. Padahal Program ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat desa yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Dalam proses pembangunan desa yang diutamakan adalah partisipasi aktif dan swadaya masyarakat. Selain itu, kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan tidak adanya analisis atau tinjauan terlebih dahulu oleh Tim ke lapangan serta adanya keterbatasan dana sehingga mengakibatkan keterbatasan peralatan dan bahan yang mengakibatkan masih banyak KK yang belum menerima Manfaat dari program Gapura.

Kendala dalam implementasi Program Gapura dapat juga dilihat dari terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kurang terampil dan kreatif dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini terkait dengan tenaga teknis desa yang tersedia di desa yang masuk ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan belum begitu mengetahui, mengerti dan menguasai prosedur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program gapura. Selain itu, dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru belum mampu memenuhi keperluan di lapangan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang implementasi program GAPURA dalam pembangunan prasarana Desa Sarang Tiung, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Implementasi Program Gapura dalam pembangunan prasarana desa belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya aktivitas/ kegiatan program belum dilaksanakan secara maksimal yaitu sosialisasi, Musdes I dan II. Selain itu, terbatasnya peralatan dan bahan yang disebabkan oleh anggaran yang terbatas dan tidak adanya tinjauan langsung Tim ke lapangan serta adanya prosedur yang belum dijalankan dari tahap pelaksanaan yaitu gotong royong dan pada tahap pengawasan yaitu kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD sehingga laporan yang dibuat sebagai bahan evaluasi ke Kecamatan kurang valid.

Kendala dalam proses Pelaksanaan Program GAPURA yaitu dalam proses perencanaan kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, Musdes I dan Musdes II, khususnya sumber daya manusia yang terampil dan kreatif dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan prasarana desa. Pada pelaksanaan yaitu adanya keterbatasan dana dalam memenuhi seluruh peralatan dan bahan yang diperlukan di lapangan, sehingga peralatan dan bahan yang tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kendala lain yang dirasakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan prasarana desa. Karena salah

satu komponen yang dapat mensukseskan pembangunan desa adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : Agar aparat pemerintah desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Program GAPURA dapat berperan aktif di lapangan untuk memastikan bahwa informasi mengenai penyelenggaraan Program GAPURA tersebar luas keseluruh pelosok desa sebelum kegiatan Program GAPURA dilaksanakan dengan cara menyediakan media informasi berupa papan pengumuman di tiap wilayah RT, seperti di tempat ibadah atau sarana pendidikan, sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif, sehingga kepedulian dan keikutsertaan akan pelaksanaan pembangunan prasarana di Desa Sarang Tiung dapat terwujud. Agar Pemerintah Desa bersama dengan Tim Pelaksana Kegiatan meninjau kelengkapan terlebih dahulu terkait pemenuhan peralatan/ bahan – bahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan dalam program Gapura sehingga tidak ada lagi nantinya masyarakat yang tidak menerima manfaat program tersebut dikarenakan keterbatasan bahan. Dan juga bersama dengan masyarakat untuk dapat melakukan swadaya menyeluruh guna menanggulangi keterbatasan dana. Selain itu, disarankan pula untuk Tenaga Teknis Desa dan Tenaga Teknis Kecamatan yang dipilih mengetahui, mengerti dan mampu dalam mendukung seluruh proses pelaksanaan program Gapura, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Agar masyarakat desa terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program Gapura sehingga kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yaitu Program Gapura melalui Pola Pemberdayaan Masyarakat sa-ijaan dapat terwujud secara nyata.

Daftar Pustaka

- Amir, M. Taufiq. 2011. *Manajemen Strategi, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Darwin, Muhadjir. "Proses Kebijakan di Era Governance" dalam *Workshop Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, 12 Desember 2005, diselenggarakan oleh Magister Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Dwiyanto, Agus. 2004. "Reorientasi Ilmu Administrasi Publik Dari Government Ke Governance" dalam *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tanggal 21 Agustus 2004*.
- _____. 2005. "Strategi Melakukan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia" dalam Agus Dwiyanto (eds.), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2003a. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- _____. 2003b. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Ginanjjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Hessel Nogi S, Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward*, Yogyakarta, Lukman Offset.
- Husein Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Nyoman Beratha, 1991, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. 1984, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- John, Charles O, 1996, *Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Khairuddin, 2000, *Pembangunan Masyarakat, Liberty*, Yogyakarta.
- Leo Agustino, 2006, *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Mardalis, 2003, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Zulkarimein, 1996, *Komunikasi Pembangunan*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2002. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Agus Erwan. 2005a. "Perpektif Kebijakan Publik" dalam *Hand Out Kuliab Teori Kebijakan dan Aksi Sosial*.

- _____. 2005b. "Memahami Perumusan Kebijakan Publik" dalam *Hand Out Kuliah Teori Kebijakan dan Aksi Sosial*. dan Utub, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Tidak untuk Publik*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Santoso, Purwo dkk (eds.). 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Siagian, Sondang, 1994, *Adminstrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Steiner, George A dan Miner, John B, 1997, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno Adiwijoyo, 2000, *Reformasi Strategi Pembangunan Nasional*, Intermasa, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Waluyo, 2007, *Manajemen Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat